

# **ANALISIS KONDISI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH SE-JAWA TAHUN 2011--2015**

Sukeksi Hastaningrum  
Irwan Taufiq Ritonga, M.Buss, Ph.D, C.A.  
Email: sukeksi.hastaningrum@mail.ugm.ac.id

Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada,  
Yogyakarta 55281, Indonesia

## **ABSTRACT**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi keuangan secara komprehensif pemerintah daerah se-Jawa tahun 2011-2015. Konsep untuk mengukur kondisi keuangan ini terdiri atas tujuh dimensi yaitu solvabilitas jangka panjang, solvabilitas jangka pendek, solvabilitas anggaran, solvabilitas operasional, fleksibilitas keuangan, solvabilitas layanan, dan kemandirian keuangan. Terdapat duapuluh sembilan indikator yang membentuk dimensi kondisi keuangan. Dimensi-dimensi ini akan digabung menjadi indeks komposit kondisi keuangan (IKK) sebagai dasar pemeringkatan dan pengkategorian. Setelah diperoleh hasil pengukuran, dilakukan analisis deskriptif untuk mengetahui karakteristik pemerintah daerah yang memiliki peringkat tertinggi dan terendah. Hasil penelitian menunjukkan terdapat

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan data sekunder berupa dokumen-dokumen yang telah dipublikasikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah dengan opini wajar memiliki kondisi keuangan yang berbeda-beda. Pada periode 2015, peringkat tertinggi kondisi keuangan masing-masing level pemerintah daerah diraih oleh Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang. Selama kurun waktu 2011-2015, pemerintah kabupaten/kota yang konsisten berada pada sepuluh peringkat tertinggi adalah Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sidoarjo, Kota Tangerang Selatan, Kota Surabaya, dan Kota Cilegon. Sementara itu, pemerintah kabupaten/kota yang konsisten berada pada sepuluh peringkat terendah adalah Kabupaten Pematang, Kabupaten Garut, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya, dan Kota Cimahi.

*Kata kunci:* Kondisi keuangan, pemerintah daerah, solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang, solvabilitas anggaran, solvabilitas operasional, fleksibilitas keuangan, solvabilitas layanan, dan kemandirian keuangan.

## PENDAHULUAN

Era baru otonomi daerah dimulai tahun 1999 dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa pemerintah pusat akan membagi kekuasaan dan memberi otonomi luas kepada pemerintah daerah. Salah satu aspek otonomi daerah adalah pengelolaan keuangan daerah (desentralisasi fiskal), yaitu pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya secara mandiri. Akibat dari desentralisasi fiskal adalah meningkatnya alokasi anggaran transfer ke daerah secara signifikan. Selama sepuluh tahun terakhir, alokasi transfer ke daerah meningkat dari Rp150,5 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp664,6 triliun di tahun 2015 (Direktorat Jenderal Anggaran, 2016).`

Meningkatnya dana yang dikelola pemerintah daerah setiap tahunnya memberikan tuntutan terhadap pengelolaan keuangan yang baik. Pemerintah pusat hanya memberikan pedoman pengelolaan keuangan daerah yang bersifat umum, sehingga masing-masing pemerintah daerah merancang kebijakan pengelolaan keuangannya dalam bentuk program dan kegiatan sesuai dengan persepsi *stakeholders*. Hal ini sejalan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengatur daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat. Oleh karena program dan kegiatan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD), maka setiap daerah akan memiliki alokasi anggaran yang berbeda. Seperti misalnya, porsi belanja pegawai (dalam belanja tidak langsung) untuk provinsi tahun anggaran 2015 sebesar 30%, sedangkan untuk kabupaten/kota sebesar 84% (www.keuda.kemendagri.go.id.).

Akibatnya, kondisi keuangan masing-masing pemerintah daerah akan bervariasi (Ritonga, 2014). Bervariasinya kondisi keuangan pemerintah daerah ini menciptakan kebutuhan bagi *stakeholders* untuk memiliki instrumen pengukuran tingkat kesehatan masing-masing daerah dalam mengelola keuangannya.

Sejauh ini pemerintah daerah tidak memiliki *awareness* terhadap kesehatan keuangan daerahnya, karena opini kewajaran BPK dianggap sebagai acuan keberhasilan pengelolaan keuangan daerahnya. Opini BPK belum mencerminkan tentang kondisi keuangan/kesehatan keuangan pemerintah daerah yang sesungguhnya, karena didasarkan atas penilaian terhadap pertanggungjawaban kinerja keuangan dibandingkan dengan perencanaan anggaran dan kesesuaian prosedur.

Secara umum para peneliti menyepakati bahwa kondisi keuangan merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajibannya tepat waktu dan kemampuan memberikan pelayanan yang diperlukan masyarakat. Penelitian tentang kondisi keuangan pemerintah daerah baru dilakukan sejak tahun 1980-an di Amerika Serikat (Kloha dkk. 2005). Brown (1993) memperkenalkan sepuluh indikator

penilaian dalam model pengukuran kondisi keuangan pemerintah daerah yang dikenal sebagai “10-point test”. Kloha dkk. (2005) mengembangkan metode “10-point scale”, yaitu sembilan indikator untuk menggambarkan kondisi kesehatan pemerintah daerah. Wang dkk. (2007) menilai kondisi keuangan pemerintah daerah dengan empat dimensi, yaitu: *cash solvency*, *budgetary solvency*, *long-terms solvency*, dan *service level solvency*. Penelitian-penelitian tersebut berfokus pada model pengukuran kondisi keuangan pemerintah daerah, belum menyentuh tataran implementasi.

Ritonga dkk. (2012, 2012b) dan Ritonga (2014) mengembangkan model pengukuran dengan mempertimbangkan kondisi pemerintah daerah di Indonesia. Terdapat enam dimensi dalam menilai kondisi keuangan pemerintah daerah, yaitu solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang, solvabilitas anggaran, solvabilitas layanan, fleksibilitas keuangan, dan kemandirian keuangan. Setiap dimensi memiliki indikator berupa rasio-rasio keuangan dengan menggunakan informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Terdapat 29 indikator pengukuran penilaian kondisi keuangan, sehingga untuk menangkap aspek kondisi keuangan pemerintah daerah akan lebih komprehensif dibandingkan penelitian lainnya. Karena semakin banyak indikator yang digunakan untuk mengukur suatu dimensi, maka hasil pengukurannya akan semakin baik.

Penelitian yang dilakukan Ritonga dkk. (2012, 2012b) dan Ritonga (2014)

bukan hanya menghasilkan instrumen pengukuran kondisi keuangan pemerintah daerah saja, tetapi sekaligus melakukan implementasi terhadap instrumen tersebut dengan menganalisis kondisi keuangan pemerintah daerah se-Jawa tahun 2007-2010. Penelitian menghasilkan peringkat kondisi keuangan pemerintah daerah untuk kabupaten/kota se-Jawa. Agar diperoleh gambaran kondisi keuangan pemerintah daerah se-Jawa yang lebih *up to date* dan untuk melihat konsistensi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya, maka penelitian ini dilakukan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah se-Jawa untuk tahun anggaran 2011-2015.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Definisi Kondisi Keuangan**

Selama beberapa dekade terakhir, telah banyak dikembangkan pengertian tentang kondisi keuangan pemerintah daerah. Groves dkk. (1981) dan Nollenberger dkk. (2003) dalam Ritonga (2014) mendefinisikannya sebagai kapasitas pemerintah daerah dalam mendanai layanan yang berkelanjutan. Kapasitas pendanaan ini dibedakan menjadi solvabilitas kas, solvabilitas anggaran, solvabilitas jangka panjang, dan solvabilitas layanan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa solvabilitas kas adalah kemampuan pemerintah daerah untuk memperoleh kas yang cukup dalam waktu satu sampai tiga bulan untuk memenuhi kewajibannya. Solvabilitas anggaran merupakan kemampuan pemerintah daerah meningkatkan pendapatan guna

membiayai layanan yang diinginkan. Solvabilitas jangka panjang menunjukkan kapasitas pemerintah daerah dalam memenuhi semua pengeluarannya baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran lainnya yang hanya akan terjadi pada saat-saat pengeluaran itu harus diselesaikan. Selanjutnya, solvabilitas layanan adalah kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan layanan baik secara kuantitas maupun kualitas yang dibutuhkan dan diminta rakyatnya. Definisi tersebut kemudian diadopsi oleh Wang dkk. (2007) dalam Ritonga (2014), dengan menyatakan bahwa kondisi keuangan pemerintah daerah sebagai tingkat solvabilitas keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari faktor-faktor solvabilitas kas, solvabilitas anggaran, solvabilitas jangka panjang, dan solvabilitas layanan.

Pengertian kondisi keuangan pemerintah daerah dalam konteks *fiscal health* diberikan oleh The Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA, 1997) dan Hendrick (2004). CICA (1997) dalam Ritonga (2014) mengukur kesehatan keuangan pemerintah daerah dari aspek keberlanjutan, kerentanan dan fleksibilitas dalam konteks keseluruhan lingkungan ekonomi dan keuangan. Keberlanjutan atau kesinambungan keuangan adalah kondisi pemerintah daerah yang mampu mempertahankan program yang sudah ada dan mampu memenuhi persyaratan kreditor tanpa menimbulkan beban utang terhadap perekonomian. Kerentanan keuangan adalah kondisi pemerintah daerah yang menjadi rentan atau tergantung pada

sumber pendanaan lain diluar kendali atau pengaruhnya, baik dari sumber-sumber domestik dan internasional. Fleksibilitas keuangan adalah kondisi pemerintah daerah dalam meningkatkan sumber daya keuangan untuk merespon peningkatan komitmen, baik melalui peningkatan pendapatan atau meningkatkan kapasitas utang. Selanjutnya, Hendrick (2004) dalam Ritonga (2014) mendefinisikan kondisi keuangan pemerintah daerah sebagai kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban keuangan serta pelayanan kepada masyarakat.

Kloha dkk. (2005a) dan Jones dan Walker (2007) dalam Ritonga (2014) mendefinisikan kondisi keuangan pemerintah dalam konteks *fiscal distress*. Kloha dkk. (2005a) mendefinisikannya sebagai kondisi ketika pemerintah daerah tidak dapat memenuhi standar dalam operasi, hutang, dan kebutuhan masyarakat selama beberapa tahun berturut-turut. Sedangkan Jones dan Walker (2007) menafsirkannya sebagai ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan kualitas layanan yang sudah ada kepada masyarakat. Sementara itu, Zafra-Gómez dkk. (2009) mendefinisikan kondisi keuangan dalam konteks *financial health*, yaitu kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi utang dan menyediakan layanan pada tingkat yang dapat diterima oleh masyarakat.

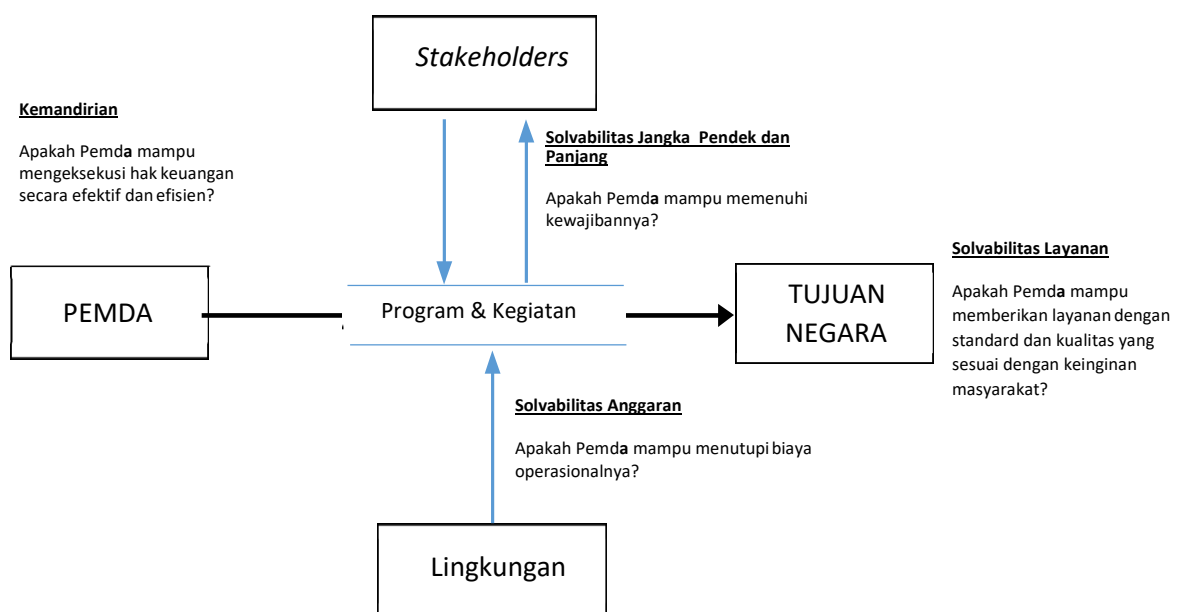
Kamnikar dkk. (2006) dalam Ritonga (2014) membangun definisi kondisi keuangan pemerintah daerah berdasarkan definisi yang dikembangkan oleh ICMA (2003) dan CICA (1997).

Kedua organisasi profesional tersebut mendefinisikan kondisi keuangan pemerintah daerah sebagai kapasitas pemerintah daerah dalam memenuhi kewajibannya saat jatuh tempo dan kemampuan untuk terus memberikan layanan kepada konstituen yang membutuhkan.

## 2. Konseptualisasi Definisi Kondisi Keuangan

Definisi kondisi keuangan yang dikemukakan sebelumnya belum memperhatikan aspek lingkungan pemerintah daerah, terutama tujuan suatu negara. Ritonga dkk. (2012, 2012b), dan Ritonga (2014) mengembangkan konseptualisasi definisi kondisi keuangan pemerintah daerah dengan melihat tujuan bernegara seperti terlihat pada gambar berikut.

Gambar 2.1 Konseptualisasi Definisi Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah



Sumber: Ritonga (2014)

Dari gambar di atas terlihat bahwa dalam rangka pencapaian tujuan negara, pemerintah daerah melaksanakan program dan kegiatan untuk melayani masyarakat. Selama proses pelaksanaan program dan kegiatannya, pemerintah daerah berinteraksi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan lingkungannya sehingga menciptakan hak dan kewajiban kepada pemerintah daerah.

Kewajiban kepada masyarakat berupa kewajiban yang bersifat normal, seperti pemenuhan standar pelayanan minimum di bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur, atau kewajiban yang bersifat luar biasa yang disebabkan oleh peristiwa luar biasa seperti bencana alam, bencana sosial, dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud hak pemerintah daerah yaitu hak

dalam mengatur dan mengelola administrasi pemda, memilih pemimpin daerah, mengelola kekayaan daerah, mengelola pegawai pemda, mengelola pajak dan retribusi daerah, mendapatkan hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di wilayahnya, mencari sumber-sumber pendapatan yang sah, dan hak-hak lain yang diatur dalam undang-undang.

Namun upaya pemerintah daerah untuk mencapai tujuan negara terbatas oleh ketersediaan sumber daya manusia, keuangan, peralatan, sumber daya waktu, dan sebagainya. Oleh karena itu diperlukan pengoptimalisasian sumber daya yang terbatas tersebut. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa kewajiban terhadap *stakeholders* terpenuhi dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan hak-haknya secara efektif dan efisien.

Dalam konteks keuangan daerah, pemenuhan hak-hak keuangan ditunjukkan dengan peningkatan pendapatan asli pemerintah daerah yang akan berujung kepada kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah. Sedangkan kewajiban keuangan ditunjukkan oleh kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjangnya (yaitu solvabilitas jangka pendek dan solvabilitas jangka panjang); kemampuan untuk menutupi kewajiban operasionalnya (yaitu solvabilitas anggaran); dan kemampuan pemda memasok layanan pada standar dan kualitas yang dibutuhkan dan diminta oleh masyarakat (solvabilitas layanan). Kondisi keuangan pemerintah daerah yang baik terjadi jika pemerintah daerah mampu mengantisipasi peristiwa yang

tidak terduga di masa yang akan datang (fleksibilitas keuangan), seperti bencana alam dan bencana sosial. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Ritonga dkk. (2012, 2013) dan Ritonga (2014) mendefinisikan kondisi keuangan pemerintah daerah sebagai kemampuan keuangan suatu pemerintah daerah untuk memenuhi kewajibannya (kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, kewajiban operasional, kewajiban pelayanan kepada masyarakat); untuk mengantisipasi kejadian tak terduga; dan untuk mengeksekusi hak-hak keuangannya secara efisien dan efektif.

### 3. Pengukuran dan Indikator Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan konseptualisasi kondisi keuangan pemerintah daerah yang dikemukakan sebelumnya, model pengukuran dari Ritonga dkk. (2012, 2012b) dan Ritonga (2014) menghasilkan enam dimensi pengukuran. Dimensi tersebut ialah solvabilitas jangka pendek, solvabilitas anggaran, solvabilitas jangka panjang, fleksibilitas keuangan, kemandirian keuangan dan solvabilitas layanan. Model pengukuran ini masih menggunakan *basis cash toward accrual*. Basis akrual penuh yang diterapkan pemerintah Indonesia mulai tahun 2015 mengakibatkan adanya penambahan dimensi pengukuran yaitu solvabilitas operasional. Enam dimensi tersebut membentuk 29 indikator dalam pengukuran kondisi keuangan yang dibangun atas dasar informasi keuangan dalam laporan keuangan pemerintah daerah dan kondisi sosial ekonomi pemerintah daerah di Indonesia. Dimensi dan indikator kondisi keuangan pemerintah daerah diformulasikan

dalam bentuk rasio-rasio. Definisi ketujuh dimensi tersebut serta formulanya adalah sebagai berikut.

a. Solvabilitas Jangka Pendek

Solvabilitas jangka pendek adalah kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajibannya dalam waktu kurang dari 12 bulan. Rasio-rasio untuk mengukur solvabilitas jangka pendek adalah sebagai berikut.

$$\text{Rasio A} = \frac{\text{Kas dan setara kas} + \text{investasi jangka pendek}}{\text{Kewajiban lancar}}$$

$$\text{Rasio B} = \frac{\text{Kas dan setara kas} + \text{investasi jangka pendek} + \text{piutang}}{\text{Kewajiban lancar}}$$

$$\text{Rasio C} = \frac{\text{Aset lancar}}{\text{Kewajiban lancar}}$$

b. Solvabilitas jangka panjang

Solvabilitas jangka panjang adalah kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya dan menunjukkan keberlanjutan pemerintah daerah. Kewajiban jangka panjang hanya bisa dipenuhi ketika pemda memiliki aset yang cukup yang didanai dari sumber daya sendiri. Aset tersebut berupa total aset yang dimiliki dan ekuitas dana investasi atau total ekuitasnya. Rumus untuk mengukur solvabilitas jangka panjang adalah sebagai berikut.

$$\text{Rasio A} = \frac{\text{Total aset tetap}}{\text{Kewajiban jangka panjang}}$$

$$\text{Rasio B} = \frac{\text{Total aset}}{\text{Total kewajiban}}$$

$$\text{Rasio C} = \frac{\text{Ekuitas dana Investasi} / \text{Total Ekuitas}}{\text{Total kewajiban}}$$

c. Solvabilitas anggaran dan Solvabilitas operasional

Solvabilitas anggaran menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan untuk menutupi operasionalnya selama satu periode anggaran keuangan. Untuk itu, indikator dalam dimensi ini menunjukkan keseimbangan antara pendapatan normal pemda (pembilang) dan pengeluaran operasional sebagai (penyebut) selama satu periode anggaran. Kemampuan ini dirumuskan dengan rasio-rasio sebagai berikut. Solvabilitas operasional merupakan dimensi yang berlaku akibat perubahan kebijakan akuntansi pada tahun 2015 yakni adanya laporan operasional dalam basis akrual. Rasio-rasio untuk mengukur solvabilitas anggaran dan solvabilitas operasional adalah sebagai berikut.

Rumus solvabilitas anggaran

$$\text{Rasio A} = \frac{(\text{Total pendapatan LRA} - \text{pendapatan DAK LRA})}{(\text{Total belanja} - \text{belanja modal})}$$

$$\text{Rasio B} = \frac{(\text{Total pendapatan LRA} - \text{pendapatan DAK LRA})}{\text{Belanja operasional}}$$

$$\text{Rasio C} = \frac{(\text{Total pendapatan LRA} - \text{pendapatan DAK})}{\text{Belanja pegawai}}$$

$$\text{Rasio D} = \frac{\text{Total pendapatan LRA}}{\text{Total belanja}}$$

Rumus solvabilitas operasional

$$\text{Rasio A} = \frac{(\text{Total pendapatan LO} - \text{pendapatan DAK LO})}{\text{Total beban}}$$

$$\text{Rasio B} = \frac{(\text{Total pendapatan LO} - \text{pendapatan DAK LO})}{\text{Beban operasional}}$$

$$\text{Rasio C} = \frac{(\text{Total pendapatan LO} - \text{pendapatan DAK LO})}{\text{Beban pegawai}}$$

$$\text{Rasio D} = \frac{\text{Total pendapatan LO}}{\text{Total beban}}$$

#### d. Fleksibilitas keuangan

Menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan sumber daya keuangannya dalam menghadapi peningkatan komitmen, baik melalui peningkatan pendapatan atau peningkatan kapasitas utang. Atau dengan kata lain, kemampuan pemerintah untuk membayar beban utang. Rumus untuk mengukur fleksibilitas keuangan adalah sebagai berikut.

$$\text{Rasio A} = \frac{(\text{Total pendapatan LRA} - \text{pendapatan DAK LRA} - \text{belanja pegawai})}{(\text{Total kewajiban} + \text{belanja pegawai})}$$

$$\text{Rasio B} = \frac{(\text{Total pendapatan LRA} - \text{pendapatan DAK LRA})}{(\text{Total kewajiban} + \text{belanja pegawai})}$$

$$\text{Rasio C} = \frac{(\text{Total pendapatan LRA} - \text{pendapatan DAK LRA} - \text{belanja pegawai})}{\text{Total kewajiban}}$$

$$\text{Rasio D} = \frac{(\text{Total pendapatan LRA} - \text{pendapatan DAK LRA} - \text{belanja pegawai})}{\text{Total kewajiban}}$$

$$\text{Rasio E} = \frac{(\text{Total pendapatan LO} - \text{pendapatan DAK LO} - \text{beban pegawai})}{(\text{Jumlah kewajiban} + \text{beban pegawai})}$$

$$\text{Rasio F} = \frac{(\text{Total pendapatan LO} - \text{pendapatan DAK LO})}{(\text{Total kewajiban} + \text{beban pegawai})}$$

#### e. Solvabilitas layanan

Solvabilitas layanan adalah kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan dan mempertahankan kualitas pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Definisi tersebut mengacu kepada definisi yang dikembangkan Wang dkk. (2007). Berdasarkan definisi tersebut, maka penyebut untuk rasio-rasio ini adalah jumlah penduduk yang dilayani. Disisi lain jumlah pembilangnya adalah sumber daya fasilitas yang dimiliki pemerintah daerah daerah yang digunakan untuk melayani masyarakat. Semakin tinggi nilai rasio ini, maka semakin baik solvabilitas layanan pemda karena semakin banyak layanan (baik kuantitas maupun kualitas) yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat. Rumus untuk mengukur rasio-rasio dimensi ini adalah sebagai berikut.

$$\text{Rasio A} = \frac{\text{Total ekuitas}}{\text{Penduduk}}$$

$$\text{Rasio B} = \frac{\text{Total aset}}{\text{Penduduk}}$$

$$\text{Rasio C} = \frac{\text{Total aset}}{\text{Penduduk}}$$



$$\text{Rasio D} = \frac{\text{Total belanja LRA}}{\text{Penduduk}}$$

$$\text{Rasio E} = \frac{\text{Total belanja modal LRA}}{\text{Penduduk}}$$

$$\text{Rasio F} = \frac{\text{Total beban LO}}{\text{Penduduk}}$$

f. Kemandirian keuangan

Kemandirian keuangan menunjukkan suatu kondisi dimana kemampuan pemerintah daerah tidak rentan terhadap sumber pendanaan dari luar, baik dari sumber nasional maupun internasional. Rasio ini mengacu kepada UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang menyatakan bahwa pendapatan asli pemerintah daerah terdiri dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, dividen dari investasi pemerintah daerah dan pendapatan asli daerah lainnya. Oleh karena itu, dimensi untuk mengukur kemandirian keuangan menggunakan rasio-rasio sebagai berikut.

$$\text{Rasio A} = \frac{\text{Total PAD LRA}}{\text{Total pendapatan LRA}}$$

$$\text{Rasio B} = \frac{\text{Total PAD LRA}}{\text{Total belanja}}$$

$$\text{Rasio C} = \frac{\text{Total PAD LO}}{\text{Total pendapatan LO}}$$

$$\text{Rasio D} = \frac{\text{Total PAD LO}}{\text{Total beban}}$$

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dikarenakan peneliti ingin mengeksplorasi lebih dalam kondisi keuangan pemerintah daerah dengan

menggunakan indikator yang komprehensif. Hal ini sejalan dengan pandangan Creswell (2014), yang menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari individu atau sekelompok individu atas suatu fenomena.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Menurut Creswell (2014) selama proses penelitian, peneliti dapat mengumpulkan dokumen-dokumen kualitatif berupa dokumen publik (seperti koran, makalah, laporan kantor) ataupun dokumen privat (seperti buku harian, diary, surat, e-mail). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah (LHP LKPD) se-Jawa tahun 2011-2015 dan data publikasi Balai Pusat Statistik (BPS) berupa jumlah penduduk, produk domestik regional bruto (PDRB), kepadatan penduduk serta jumlah usia produktif.

Prosedur analisis kondisi keuangan pemerintah daerah menurut Ritonga (2014) terdiri dari lima tahapan.

a. Mengelompokkan pemerintah daerah yang setara

Tujuan pengelompokan ini adalah untuk meningkatkan *fairness* dan daya banding antar pemerintah daerah karena besaran indeks akan menunjukkan kondisi keuangan relatif antar pemerintah daerah yang setara. Ritonga dkk. (2012, 2012b) dan Ritonga (2014) menggunakan *benchmark* tersebut dengan alasan adanya faktor kesamaan layanan yang diberikan dan kesamaan demografi dalam pengelompokan pemerintah daerah. Penghitungan indeks

harus dilakukan dalam suatu kelompok tertentu, misalnya dalam kelompok provinsi, kabupaten, kota atau pulau tertentu. Tujuannya agar terjadi keterbandingan terhadap pemda yang setara. Tiga kelompok pemerintah daerah di Pulau Jawa terdiri dari lima provinsi, 84 kabupaten dan 29 kota.

b. Menghitung Indeks Indikator dan Indeks Dimensi

1) Indeks Indikator

$$\text{Indeks Indikator} = \frac{(\text{nilai aktual} - \text{nilai min})}{(\text{nilai maks} - \text{nilai min})}$$

Nilai minimum adalah nilai terendah dari semua data yang diobservasi selama periode pengamatan. Nilai maksimum adalah nilai aktual tertinggi dari semua data yang diobservasi selama periode pengamatan. Akibatnya, indeks akan memiliki nilai tertinggi 1 dan nilai terendah 0. Nilai-nilai minimum dan maksimum ditentukan setiap tahunnya.

2) Indeks Dimensi

Indeks dimensi merupakan rata-rata aritmatika dari indeks indikator yang membentuknya. Ritonga (2012) mengasumsikan bahwa bobot masing-masing indeks indikator adalah sama. Rumus untuk menghitung indeks dimensi adalah:

$$\text{Indeks Dimensi} = \frac{(I_{\text{indikator} - 1} + I_{\text{indikator} - 2} + \dots + I_{\text{indikator} - n})}{n}$$

Dimana I adalah indeks indikator dan n adalah jumlah indikator yang membentuk dimensi

c. Menghitung indeks komposit kondisi keuangan

Indeks komposit kondisi keuangan adalah rata-rata tertimbang dari indeks dimensi yang membentuknya. Rumus untuk menghitung indeks komposit keuangan daerah laporan keuangan tahun 2011-2014 adalah:

$$FCI = w_1 * DI_1 + w_2 * DI_2 + \dots + w_n * DI_n$$

Dimana: FCI = Indeks kondisi keuangan, w = bobot indeks dimensi, DI = indeks dimensi, n = jumlah dimensi.

Bobot untuk masing-masing indeks dimensi tersebut ialah: Solvabilitas jangka pendek 0,206; solvabilitas jangka panjang 0,245; solvabilitas anggaran 0,142; fleksibilitas keuangan 0,175; solvabilitas layanan 0,107; dan kemandirian keuangan 0,125.

Kebijakan akuntansi berbasis akrual yang diterapkan pemerintah daerah mulai tahun 2015, menyebabkan bertambahnya dimensi kondisi keuangan akibat munculnya laporan operasional dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu terdapat tujuh dimensi dalam laporan keuangan tahun 2015. Bobot masing-masing dimensi diasumsikan sama untuk ketujuh dimensi dengan alasan adanya keterbatasan waktu peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam mencari bobot ketujuh dimensi tersebut. Oleh karena itu rumus untuk menghitung indeks komposit keuangan daerah tahun 2015 menjadi sebagai berikut.

$$FCI = \sum DI_n / n$$

FCI = Indeks kondisi keuangan, DI = indeks dimensi, n = jumlah dimensi

d. Melakukan pemeringkatan dan pengkategorian

Pemeringkatan diperoleh dengan mengurutkan indeks komposit kondisi keuangan pemerintah daerah dari nilai paling tinggi sampai terendah. Kemudian dikategorikan dengan menggunakan karakteristik distribusi normal sebagaimana diungkapkan dalam Ritonga (2012). Terdapat tiga kategori kondisi keuangan pemerintah daerah, yaitu “Baik”, “Cukup”, dan “Kurang”. Kondisi keuangan dikatakan “Baik” jika indeks komposit kondisi keuangan memiliki nilai lebih besar dari (+) 1 standar deviasi dari rata-rata nilai indeks komposit kondisi keuangan. Kondisi keuangan dikatakan “Cukup” jika indeks komposit kondisi keuangan memiliki nilai (-) 1 sampai dengan (+) 1 standar deviasi dari rata-rata nilai indeks komposit kondisi keuangan. Sedangkan kategori kondisi keuangan “Kurang” ialah jika nilai indeks komposit kondisi keuangan memiliki nilai kurang dari (-) 1 standar deviasi dari rata-rata indeks komposit kondisi keuangan

e. Mendeskripsikan kondisi keuangan pemerintah daerah

Analisis kondisi keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan memberikan deskripsi terhadap tiga pemerintah daerah yang memiliki indeks komposit kondisi keuangan tertinggi dan tiga pemerintah daerah yang memiliki indeks komposit kondisi keuangan terendah. Berdasarkan tiga peringkat tertinggi dan terendah pemerintah daerah tersebut, kemudian dilakukan identifikasi karakteristiknya berdasarkan teori permintaan dan penawaran yang berlaku

pada pemerintah daerah sebagaimana dinyatakan oleh Deacon (1978) dan Ohls dan Wales (1972). Teori permintaan dan penawaran menjelaskan hubungan antara kondisi keuangan dengan faktor-faktor yang memengaruhinya. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi kondisi keuangan pemerintah daerah dalam penelitian ini ada enam, yaitu (1) jumlah penduduk, (2) kemakmuran masyarakat, (3) profil umur masyarakat, (4) kepadatan penduduk, (5) efisiensi keuangan, dan (6) biaya barang dan jasa.

Validitas hasil penelitian ini menggunakan metode *peer debriefing*, yaitu dengan menggunakan orang lain untuk membantu menelaah dan bertanya mengenai penelitian sehingga pemahamannya selaras dengan peneliti (Creswell 2014). *Peer debriefer* dalam penelitian ini ialah dosen pembimbing dan satu mahasiswa magister akuntansi konsentrasi Akuntansi Sektor Publik khususnya dengan topik penelitian yang serupa dengan melakukan verifikasi atas kertas kerja tahun 2015. Validitas data juga dilakukan secara internal oleh peneliti dengan teknik *footing* dan *cross footing*. Apabila ditemukan adanya perbedaan data antara teknik *footing* dan *cross footing* dengan data *on face* LKPD, maka data yang digunakan ialah data LKPD pada tahun yang bersangkutan. Pengecekan data juga dilakukan secara berulang sebanyak tiga kali sampai diyakini kebenaran atas perhitungan datanya.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### 1. Sumber Data Analisis

Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan pemerintah daerah (LHP LKPD) yang telah diaudit oleh BPK RI periode tahun 2011-2015. Jumlah LHP LKPD yang tersedia di Jawa selama kurun waktu tersebut 586 laporan. Data yang dianalisis ialah laporan keuangan dengan opini wajar. Terdapat delapan laporan keuangan yang tidak dapat diyakini keandalannya karena memiliki opini tidak wajar maupun opini *disclaimer*. Laporan keuangan dengan opini tidak wajar yakni Kabupaten Mojokerto pada tahun 2013, sedangkan opini *disclaimer* terdiri dari satu di tahun 2011 (Kabupaten Mojokerto), dua di tahun 2013 (Provinsi Banten dan Kabupaten Indramayu), tiga di tahun 2014 (Provinsi Banten, Kabupaten Subang dan Kabupaten Pandeglang) dan satu di tahun 2015 (Kabupaten Subang). Oleh karena itu, data yang bisa dianalisis berjumlah 578 laporan keuangan atau 98% dari keseluruhan data yang tersedia. Data publikasi Balai Pusat Statistik (BPS) juga diperlukan untuk mengidentifikasi karakteristik pemerintah daerah yang memiliki peringkat tertinggi dan terendah. Data tersebut berupa jumlah penduduk, produk domestik regional bruto (PDRB), kepadatan penduduk serta jumlah usia produktif.

### 2. Deskriptif Statistik

Tabel 1 menunjukkan data indikator kondisi keuangan tidak terdistribusi normal karena nilai skewness tidak sama dengan 0 dan kurtosis tidak sama dengan 3 di hampir semua indikator. Untuk itu, median menjadi

representasi dari populasi (Kamnikar dkk. 2006 dalam Ritonga 2014).

#### a. Solvabilitas jangka pendek

Nilai median untuk pemerintah provinsi menunjukkan bahwa pemerintah provinsi memiliki 4,91; 6,24; 6,49 kali aset lancar untuk menjamin kewajiban jangka pendeknya. Pemerintah kabupaten memiliki 22,63; 27,76; 30,83 kali aset lancar untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya, sedangkan pemerintah kota memiliki 21,04; 24,89, 26,21 kali aset lancar untuk menjamin kewajiban jangka pendeknya.

Tabel 2 menunjukkan tren nilai median solvabilitas jangka pendek. Terjadi kecenderungan kenaikan solvabilitas jangka pendek untuk pemerintah provinsi dari tahun 2011-2013, kemudian mulai mengalami penurunan untuk tahun selanjutnya. Sementara itu, level pemerintah kabupaten dan kota mengalami tren fluktuatif. Namun, dari tahun 2014 menuju 2015 hampir semua level pemerintah daerah mengalami penurunan untuk masing-masing rasio. Penurunan terjadi karena adanya kenaikan kewajiban lancar di sebagian besar pemerintah daerah. Data riil menunjukkan terjadi kenaikan sebesar 61% kewajiban lancar pemerintah daerah yakni Rp3,578triliun di tahun 2014 menjadi Rp5,767triliun tahun 2015, dan diikuti dengan kenaikan aset lancar sebesar 7% (Rp61,272triliun menjadi Rp65,475triliun). Secara keseluruhan, rata-rata rasio A,B, dan C memiliki nilai positif, hal ini berarti bahwa pemerintah daerah di Jawa memiliki aktiva lancar yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

b. Solvabilitas jangka panjang

Nilai median untuk pemerintah provinsi menunjukkan bahwa setiap satu rupiah kewajiban jangka panjangnya dijamin oleh 4.488.128.781.056,00 rupiah aset; 65,98 rupiah aset tetap; dan 49,96 rupiah ekuitas. Nilai median pemerintah kabupaten menunjukkan bahwa setiap satu rupiah kewajiban jangka panjang dijamin oleh 1.999.765.065.725,02 rupiah aset; 367,13 rupiah aset tetap; dan 283,62 rupiah ekuitas. Sementara itu, nilai median pemerintah kota menunjukkan bahwa setiap satu rupiah kewajiban jangka panjangnya dijamin 1.452.315.695.757,26 rupiah aset; 331,60 rupiah aset tetap; dan 258,10 rupiah ekuitas.

Tabel 3 menunjukkan tren nilai median solvabilitas jangka panjang. menunjukkan angka fluktuatif dengan kecenderungan menurun di hampir semua rasio A,B,C di semua level pemerintah daerah di Jawa tahun 2011-2015. Semua rasio menunjukkan penurunan dari tahun 2014 ke 2015, kecuali untuk rasio A di pemerintah provinsi. Rasio A yaitu perbandingan antara aset tetap dan kewajiban jangka panjang di provinsi naik dikarenakan terjadi penurunan yang drastis di kewajiban jangka panjangnya yakni sebesar 41% (Rp20,07juta tahun 2014 menjadi Rp11,77juta di tahun 2015). Namun secara keseluruhan level pemerintah daerah untuk rasio A, terjadi penurunan aset tetap sebesar 11% dan kenaikan kewajiban jangka panjang sebesar 30%. Data riil menunjukkan pada tahun 2014 kewajiban jangka panjang sebesar Rp216,95miliar, naik menjadi Rp282,48miliar di tahun 2015. Sementara itu, penurunan terjadi pada aset tetap yakni dari Rp496,43miliar turun menjadi

Rp443,06miliar. Nilai median menunjukkan bahwa rasio A,B,C masih bernilai positif, artinya bahwa pemerintah daerah di Jawa memiliki kecukupan aset dan ekuitas yang mampu menjamin kewajiban jangka panjangnya.

c. Solvabilitas anggaran

Nilai median masing-masing pemerintah daerah menunjukkan angka yang positif, artinya bahwa pemerintah daerah memiliki pendapatan yang cukup untuk menutupi belanja operasionalnya. Nilai median secara berurutan masing-masing rasio ialah 1,117; 1,605 ; 6,862; 1,022 untuk pemerintah provinsi. Pemerintah Kabupaten memiliki nilai median sebesar 1,175; 1,206; 1,717; 1,031, sedangkan pemerintah kota nilai mediannya yakni 1,272; 1,274; 2,003; 1,046 untuk masing-masing rasio.

Tabel 4 menunjukkan tren nilai median solvabilitas anggaran. Tren solvabilitas anggaran cenderung mengalami peningkatan di semua rasio A,B,C, dan D meskipun tidak terlalu signifikan. Hal ini disebabkan karena kenaikan total pendapatan setelah dikurangi pendapatan DAK lebih tinggi dibandingkan kenaikan belanja pemerintah daerah. Rasio C mengalami kenaikan yang tajam di pemerintah provinsi dan kabupaten, karena belanja pegawai mengalami kenaikan yang tidak signifikan jika dibandingkan dengan kenaikan pendapatan setelah dikurangi pendapatan DAK.

d. Solvabilitas operasional

Nilai median masing-masing rasio untuk pemerintah provinsi yakni 1,06; 1,59;

9,22; 1,07. Sementara itu, nilai median sebesar 1,11; 1,20; 2,12; 1,15 untuk pemerintah kabupaten dan 1,15; 2,33; 2,34; 1,19 untuk pemerintah kota. Nilai median positif berarti bahwa pemerintah daerah di Jawa memiliki pendapatan yang cukup untuk mendanai beban operasionalnya.

#### e. Fleksibilitas keuangan

Nilai median pemerintah provinsi menunjukkan bahwa pemerintah provinsi memiliki fleksibilitas keuangan sebesar 4,87; 5,72; 5,46; 6,13 kali untuk mengantisipasi kejadian tidak terduga. Pemerintah kabupaten memiliki fleksibilitas keuangan sebesar 0,71; 1,70; 1,10; dan 2,06 kali untuk mengantisipasi kejadian tidak terduga, sedangkan pemerintah kota memiliki fleksibilitas 0,97; 1,95; 1,30; 2,28 kali untuk mengantisipasi kejadian tidak terduga.

Tabel 5 menunjukkan tren rasio fleksibilitas keuangan. Tren fleksibilitas keuangan pemerintah daerah di Jawa menunjukkan angka fluktuatif dengan tren yang meningkat dari tahun 2011 menuju tahun 2015. Hal ini dikarenakan kenaikan total pendapatan lebih besar dibandingkan dengan kenaikan belanja pegawai. Dibandingkan dengan pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi memiliki nilai rasio fleksibilitas keuangan yang lebih tinggi. Artinya bahwa pemerintah provinsi lebih fleksibel dibandingkan pemerintah kabupaten/kota dalam menghadapi kejadian luar biasa yang mungkin terjadi. Namun, secara keseluruhan pemerintah daerah di Jawa memiliki kemampuan menghadapi kejadian yang tak terduga karena rasio A,B,C dan D bernilai positif. Kehati-hatian dalam menjaga rasio-

rasio ini perlu diperhatikan pemerintah karena sebagian besar pemerintah daerah di wilayah Jawa secara geografis berada di daerah rawan bencana. Sebagai contoh, pemerintah daerah di sepanjang pantai selatan di Pulau Jawa rawan terhadap bencana tsunami karena berada pada *jalur ring of fire* yang sering terjadi gempa bumi. Oleh karena itu pemerintah daerah yang terletak di daerah rawan bencana disarankan memiliki nilai yang lebih tinggi untuk rasio fleksibilitas keuangan dalam rangka mengantisipasi kejadian luar biasa tersebut.

#### f. Solvabilitas layanan

Nilai median rasio A, B dan D menunjukkan bahwa pemerintah provinsi memiliki ekuitas dan aset senilai Rp710.174,63 dan Rp720.138,24 serta membelanjakan Rp450.025,85 untuk melayani setiap warganya. Pemerintah kabupaten memiliki ekuitas dan aset senilai Rp2.568.178 dan Rp2.188.539 serta membelanjakan Rp1.345.575 untuk melayani setiap warganya. Sementara itu, pemerintah kota memiliki ekuitas dan aset senilai Rp7.184.744,01 dan Rp7.194.373,83 serta membelanjakan Rp2.374.533,15 untuk melayani setiap warganya.

Tabel 6 menunjukkan tren solvabilitas layanan. Pemerintah provinsi memiliki tren meningkat rasio A,B dari tahun 2011 sampai tahun 2013, kemudian menurun di tahun selanjutnya. Rasio C, D, dan E fluktuatif, tapi cenderung naik di tahun 2015. Sementara itu terjadi peningkatan dari tahun 2011-2014 untuk seluruh rasio solvabilitas layanan pada level pemerintah kabupaten dan kota. Namun, terjadi penurunan di tahun 2015 khususnya untuk rasio A, B, dan C

dikarenakan adanya perubahan kebijakan akuntansi dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh. Akibatnya terjadi penyusutan nilai aset di tahun 2015, sehingga nilai aset akan berkurang jika dibandingkan tahun sebelumnya. Misalnya, rasio B dan C pemerintah kabupaten menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki aset senilai Rp3.112.558,41 dan Rp2.655.242.04 untuk melayani setiap warganya pada tahun 2014, turun menjadi Rp2.561.416 dan Rp2.049.651,80 di tahun 2015.

Di lain pihak untuk rasio D dan E terjadi peningkatan selama kurun waktu lima tahun tersebut akibat adanya kenaikan belanja pada semua level pemerintah daerah. Misalnya, rasio D pemerintah kabupaten menunjukkan bahwa pemerintah daerah melakukan pengeluaran belanja sebesar Rp1.541.303 pada tahun 2014 untuk melayani setiap warganya dan meningkat menjadi Rp1.819.139 pada tahun 2015. Hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah di Jawa semakin banyak menyediakan layanan baik barang maupun jasa untuk masyarakatnya.

#### g. Kemandirian keuangan

Nilai median menunjukkan seberapa besar prosentase pendapatan daerah yang berada di bawah kendali mereka. Tabel 7 menunjukkan tren kemandirian keuangan. Tren menunjukkan bahwa rasio A dan rasio B memiliki kecenderungan stabil. Berdasarkan nilai median kemandirian daerah tersebut, dapat disimpulkan bahwa prosentase pendapatan pemerintah daerah yang berada di bawah kendali mereka ialah sekitar 65% untuk pemerintah provinsi, 14%

untuk pemerintah kabupaten, dan 23% untuk pemerintah kota. Kemandirian keuangan di level pemerintah kabupaten menjadi yang terlemah dikarenakan pemerintah kabupaten hanya mengelola sumber pendapatan non strategis yang tidak berdampak besar terhadap pendapatan asli daerah, seperti pajak hotel, pajak reklame, dan pajak restoran. Secara alamiah pemerintah kabupaten bukan merupakan pusat keramaian/perekonomian, sehingga penerimaan PAD dari sektor pajak maupun retribusi daerah sulit untuk dioptimalkan.

#### 3. Ilustrasi Perhitungan Indeks Komposit Kondisi Keuangan (IKK)

Perhitungan dicontohkan dengan mencari indeks dimensi solvabilitas jangka pendek Kota Bogor tahun 2015.

Diketahui : Rasio A ((Kas dan setara kas + investasi jangka pendek)/kewajiban jangka pendek) = 19,716, Rasio B ((Kas dan setara kas + investasi jangka pendek + piutang)/kewajiban jangka pendek) = 36,675. Rasio C (Aset lancar/Kewajiban lancar) = 38,224.

##### a. Menghitung indeks rasio solvabilitas jangka pendek

Rumus mencari indeks rasio adalah (nilai aktual-nilai minimum)/(nilai maksimum-nilai minimum). Nilai minimum dan maksimum dihitung untuk masing-masing rasio selama satu tahun. Rasio A Kota Bogor memiliki nilai minimum dan maksimum sebesar 2,662 dan 191,682. Perhitungan indeks rasio solvabilitas jangka pendek Kota Bogor =  $(19,716 - 2,662) / (191,682 - 2,662) = 0,090$ .

b. Menghitung indeks dimensi solvabilitas jangka pendek

Dimensi solvabilitas jangka pendek dibentuk oleh tiga indikator yakni Rasio A, B, dan C. Diketahui, Kota Bogor memiliki nilai indeks rasio A,B,C masing-masing adalah 0,90; 0,148; 0,144. Indeks dimensi adalah rata-rata aritmatik dari indeks rasionya. Perhitungan indeks dimensi solvabilitas jangka pendek Kota Bogor yaitu  $(0,90+0,148+0,144)/3 = 0,127$ .

c. Menghitung indeks komposit kondisi keuangan

Terdapat tujuh dimensi kondisi keuangan di tahun 2015. Kota Bogor memiliki nilai dimensi solvabilitas jangka pendek, solvabilitas anggaran, solvabilitas operasional, solvabilitas jangka panjang, solvabilitas layanan, fleksibilitas keuangan, dan kemandirian keuangan masing-masing sebesar 0,127; 0,004; 0,007; 0,000; 0,149; 0,019; dan 0,490. Rumus mencari indeks komposit kondisi keuangan adalah  $IKK = \sum DIn/n$ . Perhitungan IKK Kota Bogor tahun 2015 yakni  $(0,127+0,004+0,007+0,000+0,149+0,019+0,490)/7 = 0,124$ .

4. Pemingkatan dan pengategorian IKK

Berdasarkan indeks kondisi keuangan (IKK) yang telah dihitung, selanjutnya akan dilakukan pengategorian berdasarkan tiga kriteria kondisi keuangan pemerintah daerah yakni baik, cukup, dan kurang. Kondisi keuangan dikatakan baik jika nilai IKK lebih besar dari  $\text{mean} + (1 \times \text{standar deviasi})$ .

Kondisi keuangan disebut cukup jika nilai IKK antara  $\text{mean} + (1 \times \text{standar deviasi})$  dan  $\text{mean} - (1 \times \text{standar deviasi})$ . Terakhir, kondisi keuangan disebut kurang jika nilai IKK kurang dari  $\text{mean} - (1 \times \text{standar deviasi})$ .

Sebagai ilustrasi, untuk level pemerintah kota tahun 2015, mean dari seluruh nilai IKK pemerintah kota yaitu 0,196 dengan standar deviasi 0,110. Kondisi keuangan pemerintah kota dikatakan Baik jika memiliki nilai IKK lebih dari  $0,196 + 0,110 = 0,306$ . Kondisi keuangan pemerintah kota disebut Kurang Baik, jika memiliki nilai IKK kurang dari  $0,196 - 0,110 = 0,087$ , sedangkan kategori Cukup Baik yaitu pemerintah kota yang memiliki nilai IKK 0,306 hingga 0,087. Peringkat dan kategori nilai IKK tahun 2011-2015 masing-masing pemerintah daerah tersaji pada tabel 8.

5. Identifikasi Karakteristik

Analisis karakteristik kondisi keuangan dilakukan dengan maksud untuk mengidentifikasi hal-hal yang mempengaruhi kondisi keuangan suatu pemerintah daerah. Identifikasi dilakukan untuk tiga pemerintah kabupaten dengan peringkat kondisi keuangan tertinggi dan tiga pemerintah kabupaten dengan peringkat terendah tahun 2015. Adapun karakteristik yang akan diidentifikasi terdiri dari tingkat kemakmuran, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, kepadatan penduduk, efisiensi keuangan, dan jumlah barang dan jasa pemerintah daerah, dan profil umur masyarakat sebagaimana diungkapkan oleh Ritonga (2014).



Tabel 9. Identifikasi Karakteristik Pemerintah Kabupaten tahun 2015

Peringkat	Pemerintah Daerah	PDRB per kapita (ribu rupiah)	Jumlah Penduduk	Penduduk Miskin	Profil umur masyarakat		Kepadatan Penduduk (Jiwa/km <sup>2</sup> )	Belanja Peg/Total Belanja	UMK 2015
					Produktif	Non Produktif			
Tertinggi	Kabupaten Tangerang	30.270	3.370.594	5,71%	68,76%	31,24%	3.512	31%	2.710.000
	Kabupaten Pangandaran	20.920	456.500	10,76%	70,87%	29,13%	452	37%	1.165.000
	Kabupaten Bekasi	75.800	3.246.013	5,46%	69,24%	30,76%	2.548	33%	2.840.000
	<b>Rata-rata</b>	<b>42.330</b>	<b>2.357.702</b>	<b>7,31%</b>	<b>69,62%</b>	<b>30,38%</b>	<b>2.171</b>	<b>34%</b>	<b>2.238.333</b>
Terendah	Kabupaten Ponorogo	17.190	867.393	11,91%	68,06%	31,94%	632	53%	1.150.000
	Kabupaten Blora	19.210	852.088	13,52%	68,25%	31,75%	468	53%	1.180.000
	Kabupaten Garut	15.960	2.548.723	12,81%	63,01%	36,99%	824	52%	1.250.000
	<b>Rata-rata</b>	<b>17.453</b>	<b>1.422.735</b>	<b>12,75%</b>	<b>66,44%</b>	<b>33,56%</b>	<b>641</b>	<b>52%</b>	<b>1.193.333</b>

Identifikasi karakteristik pemerintah kabupaten di Jawa tahun 2015 adalah:

- a. Pemerintah kabupaten dengan kondisi keuangan tinggi memiliki rata-rata tingkat kemakmuran yang tinggi pula. Kemakmuran diwakili dengan tingkat PDRB perkapita masing-masing daerah. Peningkatan kekayaan per kapita masyarakat akan memperbaiki kondisi keuangan pemerintah daerah (Berne dan Schram p.80 dalam Ritonga 2014).
- b. Pemerintah kabupaten dengan peringkat tertinggi memiliki rata-rata jumlah penduduk yang lebih banyak dibandingkan dengan peringkat terendah. Jumlah penduduk yang lebih besar namun disertai dengan adanya peningkatan secara proporsional dalam pendapatan daerah untuk membiayai belanjanya, maka kondisi keuangan pemerintah daerah akan tetap membaik.
- c. Pemerintah kabupaten dengan rata-rata prosentase penduduk miskin yang lebih kecil memiliki kondisi keuangan yang lebih baik. Jumlah penduduk miskin yang tinggi mengharuskan pemerintah daerah untuk menyediakan barang sosial yang lebih banyak,

sementara pendapatan tidak bisa dimaksimalkan. Hal ini mengakibatkan belanja pemerintah daerah juga akan lebih besar, sehingga akan menurunkan kondisi keuangan.

- d. Nollenberger dkk. (2003) dalam Ritonga (2014) menyatakan bahwa penduduk usia kelompok non produktif membutuhkan tambahan layanan dan barang dibandingkan usia produktif, sehingga pengeluaran pemerintah daerah akan meningkat. Hal ini sejalan dengan hasil identifikasi pemerintah kabupaten di Jawa yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah dengan jumlah usia produktif yang lebih banyak akan memiliki peringkat yang lebih baik.
- e. Pemerintah daerah dengan tingkat kepadatan penduduk yang lebih tinggi, memiliki kondisi keuangan yang lebih baik. Jika pemerintah daerah memiliki populasi yang terpusat di wilayah yang tidak luas, maka biaya penyediaan layanan seperti misalnya penyediaan layanan berupa sekolah, pusat kesehatan, pemeliharaan jalan dan jembatan akan lebih murah untuk setiap penduduknya. Demikian pula sebaliknya, jika suatu pemerintah

- daerah memiliki populasi yang tersebar di wilayah yang luas, maka biaya penyediaan barang dan jasa akan lebih tinggi untuk setiap penduduknya.
- f. Efisiensi keuangan pemerintah daerah mempengaruhi kondisi keuangannya melalui biaya untuk menghasilkan jasa dan produk. Salah satu unsur biaya tersebut yakni belanja pegawai. Belanja gaji pegawai yang berlebihan merupakan kontributor terhadap tekanan keuangan pemerintah daerah (Beck 1982 dalam Ritonga 2014). Hasil identifikasi menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten di Jawa dengan kondisi keuangan rendah akan memiliki jumlah pegawai yang lebih banyak.
  - g. Dalam menyediakan barang dan jasa, pemerintah daerah melibatkan pihak ketiga dalam beberapa kesempatan. Misalnya, untuk membiayai suatu proyek pemerintah harus membayar tenaga kerja yang mengerjakan proyek tersebut. Oleh karena itu, upah tenaga kerja menjadi salah satu unsur biaya pengadaan barang dan jasa. Semakin tinggi upah tenaga kerja di suatu daerah, maka semakin rendah/sedikit barang dan jasa yang mampu disediakan oleh pemerintah daerah (Beck 1982 dalam Ritonga 2014). Namun hal tersebut tidak terjadi di pemerintah kabupaten di Jawa. Hal ini dikarenakan perekonomian di Jawa secara umum lebih didorong oleh sektor swasta dibandingkan dengan belanja pemerintah daerah, sehingga peningkatan UMK akan disertai dengan peningkatan PAD pemerintah

dari sektor swasta. Kondisi ini akan membuat kondisi keuangan pemerintah daerah menjadi lebih baik.

## **KESIMPULAN**

1. Kondisi keuangan pemerintah daerah di Jawa selama tahun 2011-2015 berdasarkan tiga level pemerintah daerah adalah sebagai berikut:
  - a) Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menduduki peringkat tertinggi kondisi keuangannya selama tahun 2011-2014, sedangkan Provinsi Banten berperingkat tertinggi dengan kondisi keuangan yang baik untuk tahun 2015. Pada tahun 2015, pemerintah provinsi yang memiliki kondisi keuangan cukup baik secara berurutan yaitu DIY, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki kondisi keuangan kurang baik sebagai peringkat terendah.
  - b) Pemerintah Kabupaten yang konsisten berada dalam sepuluh pemerintah kabupaten berperingkat tertinggi kurun waktu 2011-2015 yakni Kabupaten Tangerang, Bekasi, Bogor, dan Sidoarjo. Pemerintah Kabupaten Pematang dan Garut selalu masuk ke dalam daftar sepuluh pemerintah kabupaten yang memiliki peringkat terendah selama lima tahun tersebut. Selanjutnya untuk tahun 2015, dari 83 pemerintah kabupaten, 10 (12%) berkategori

- baik, 69 (84%) berkategori cukup, dan 4 (4%) berkategori kurang baik kondisi keuangannya.
- c) Pemerintah kota yang selalu berada dalam sepuluh kondisi keuangan tertinggi selama tahun 2011-2015 yakni Kota Tangerang Selatan, Surabaya, dan Cilegon, sedangkan yang konsisten berada dalam sepuluh kota terendah kondisi keuangannya didapat oleh Kota Sukabumi, Tasikmalaya, dan Cimahi. Sementara itu, dari 29 pemerintah kota di tahun 2015, 5 (17%) berkategori baik, dan sisanya sebanyak 14 (83%) berkategori cukup baik kondisi keuangannya.
2. Identifikasi karakteristik kondisi keuangan pemerintah daerah di Jawa menyimpulkan bahwa tingkat kemakmuran yang lebih tinggi, jumlah penduduk yang banyak, jumlah penduduk miskin lebih rendah, kepadatan penduduk lebih besar, belanja pegawai yang lebih rendah, upah minimum pekerja yang lebih tinggi, serta jumlah usia produktif yang lebih banyak cenderung mengalami kondisi keuangan yang lebih baik. Dan karakteristik sebaliknya akan membuat kondisi keuangan pemerintah daerah menjadi lebih buruk.
1. Penelitian tidak melakukan klasterisasi terhadap obyek penelitian, hanya mengelompokkan berdasarkan tipe pemerintah daerah yaitu provinsi, kabupaten, dan kota. Klasterisasi dapat meningkatkan nilai daya banding sehingga upaya monitoring kondisi keuangan dapat dilakukan secara apple to apple. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan model klasterisasi pemerintah daerah yang baik, sehingga analisis yang diperoleh akan lebih akurat.
  2. Belum ada standar baku penggunaan metode pengkategorian kondisi keuangan pemerintah daerah, sehingga pemilihan model pengkategorian berdasarkan subjektivitas penulis yakni menggunakan mean dan standar deviasi. Penggunaan metode lain kemungkinan akan menghasilkan kategori kondisi keuangan yang berbeda. Oleh karena itu disarankan untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan model pengkategorian lain yang lebih sesuai.
  3. Bobot koefisien pada tujuh dimensi laporan keuangan berbasis akrual tahun 2015 diasumsikan sama yakni 1/7 untuk masing-masing dimensi, padahal kemungkinan bisa berbeda. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian selanjutnya untuk mencari bobot ketujuh dimensi pembentuk kondisi keuangan pemerintah daerah tersebut.

**KETERBATASAN DAN SARAN  
UNTUK PENELITIAN  
SELANJUTNYA**

## DAFTAR PUSTAKA

- Carmeli, A. 2008. "The Fiscal Distress of Local Governments in Israel: Sources and Coping Strategies." *Administration & Society*, Vol. 39, No. 8., 984- 1007.
- CICA. 1997. *Indicators of Government Financial Condition*. The Canadian Institute of Chartered Accountants. Toronto.
- Creswell, J.W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. USA: Sage Publications Inc.
- Deacon, RT. 1978. "A demand model for the local public sector." *The Review of Economics and Statistics*, Vol. 60, No. 2, 184-92.
- Direktorat Jenderal Anggaran. 2015. *Budget In Brief APBN 2015*. Diakses dari <http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/acontent/bibfin.pdf> tanggal 17 Maret 2017.
- Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah. 2015. *Postur APBD 2015, Komposisi Rincian Belanja Tidak Langsung TA. 2105*. Diakses dari <http://www.keuda.kemendagri.go.id/datin/index/1/2015>. tanggal 17 Maret 2017.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2013. *Analisis Realisasi APBD Tahun Anggaran 2012*. Diakses dari <https://antokcenter.files.wordpress.com/2014/06/realisasi-apbd-2012revisi2a.pdf>. tanggal 17 Maret 2017.
- Groves, S.M., Godsey, W.M., dan Shulman, M.A. 1981. "Financial Indicators for Local Government." *Public Budgeting & Finance*, Vol. 1, No. 2, 5-19.
- Hennink, M., Hutter, I. dan Bailey, A., 2011. *Qualitative Research Methods*. USA: Sage Publications Inc.
- Hendrick, R. 2004. "Assessing and Measuring the Fiscal Health of Local Governments: Focus on Chicago Suburban Municipalities." *Urban Affairs Review*. Vol. 40, No. 1, 78-114.
- Honadle, BW dan Lloyd Jones. 1998. "Analyzing rural local governments financial condition: An exploratory application of three tools." *Public Budgeting & Finance*, Vol. 18, No.2, 69-86.
- Jones, S. dan Walker, R.G. 2007. "Explanators of Local Government Distress." *ABACUS*, Vol. 43, No. 3, 396 418.
- Kamnikar, J.A., Kamnikar, E.G., dan Deal, K.H. 2006. "Assessing a State's Financial Condition." *The Journal of Government Financial Management*, Vol. 55, No. 3, 30-36.
- Kloha, P., Weissert C.S., dan Kleine, R. 2005. "Developing and Testing a Composite Model to Predict Local Fiscal Distress." *Public Administration Review*, Vol. 65, No. 3, 313-323.

- Kioko, SN 2013. "Reporting on the Financial Condition of the States 2002-2010." *Jurnal of Public Budgeting, Accounting, and Financial Management*, Vol.25, No.1, 165-198.
- Nollenberger, K., Groves, M.S., dan Valente, M.G. 2003. *Evaluating Financial Condition: A Handbook for Local Government*. International City/County Management Association. Washington, DC.
- Ohls, J.C. dan T.J. Wales. 1972. "Supply and demand for state and local services." *The Review of Economics and Statistics*, Vol. 54, No. 4, 424-430.
- Priyono dan Ismail, Z. 2016. *Teori Ekonomi*. Surabaya: Zifatama Publisher
- Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Republik Indonesia 2010. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Republik Indonesia. 2006. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Ritonga, I.T., Clark, C., dan Wickremashinghe, G. 2012. "Developing a Measure of Local Government Financial Condition." *The 13th International Annual Conference Asian Academic Accounting Association*. Kyoto, Jepang, 9-12 November 2012.
- \_\_\_\_\_, 2012b. "Assessing Financial Condition of Local Government in Indonesia: An Exploration." *Municipal and Public Finance*, Vol. 1, Issue 2.
- \_\_\_\_\_, 2013. "Factors Affecting Financial Condition of Local Government in Indonesia." *The 7th Asia Pacific Interdisciplinary Research Accounting (APIRA)*. Kobe University, Jepang, 26-28

Juli 2013.

Ritonga, I.T. 2014. *Analisis Laporan Keuangan Pemda*. Yogyakarta: Lembaga Kajian Manajemen Pemerintah Daerah dan Pustaka Pelajar.

Rivenbark, W.C., Roenigk, D.J., dan Allison, G.S. 2009. "Communicating Financial Condition to Elected Officials in Local Government." *Popular Government*, Vol. 77, No. 1, 4-13.

Sekaran, U. dan Bougie, R. 2013. *Research Methods for Business: A Skill Building Approach*. United Kingdom: John Wiley & Sons Ltd.

Situs Pemetaan Potensi Ekonomi Daerah Wilayah Jawa, 2012. Keunggulan Pulau Jawa. Diakses dari <http://appejawa.navperencanaan.com/whypromotion/viewjawa> tanggal 27 Februari 2017.

Wang, X., Dennis, L., dan Tu, Y.S.J. 2007. "Measuring Financial Condition: A Study of U.S. States." *Public Budgeting & Finance*, Vol. 27, No. 2, 1-21.

Zafra-Gómez, J.L., López-Hernández, A.M., dan Hernández-Bastida, A. 2009. "Developing a Model to Measure Financial Condition in Local Government." *The American Review of Public Administration*, Vol. 39, No. 4, 425-49



Tabel 1. Deskriptif Statistik Indikator Kondisi Keuangan

Wilayah	Indikator	Mean	Standard Error	Median	Standard Deviation	Kurtosis	Skewness	Minimum	Maximum	Count
<b>Provinsi</b>										
Solvabilitas Jangka Pendek	Rasio A	26,47	9,94	4,91	47,69	3,41	2,12	0,62	165,26	23
	Rasio B	28,08	9,99	6,24	47,91	3,44	2,12	1,95	167,11	23
	Rasio C	35,98	13,21	6,49	63,35	3,49	2,10	2,16	224,05	23
Solvabilitas Jangka Panjang	Rasio A	5.762.957.704.261,18	1.394.753.104.635,12	4.488.128.781.056,00	6.689.000.906.447,38	(0,68)	0,88	545,05	18.046.662.637.174,50	23
	Rasio B	413,73	160,04	65,98	767,55	2,77	2,04	21,77	2.349,52	23
	Rasio C	379,72	147,55	49,96	707,61	2,67	2,02	3,26	2.125,47	23
	Rasio D	1,15	0,03	1,12	0,15	17,41	3,94	1,03	1,80	23
Solvabilitas Anggaran	Rasio B	1,65	0,04	1,61	0,19	(0,34)	0,31	1,33	2,04	23
	Rasio C	7,47	0,58	6,86	2,80	(0,32)	0,55	3,18	13,41	23
	Rasio D	1,03	0,02	1,02	0,08	12,18	3,03	0,94	1,33	23
Solvabilitas Operasional	Rasio A	1,09	0,03	1,06	0,07	(2,25)	0,38	1,01	1,17	5
	Rasio B	1,53	0,10	1,59	0,23	3,16	(1,56)	1,14	1,76	5
	Rasio C	9,84	1,75	9,22	3,91	(2,39)	0,03	5,13	14,04	5
Solvabilitas Keuangan	Rasio D	1,09	0,03	1,07	0,07	(1,84)	0,48	1,01	1,19	5
	Rasio A	5,27	0,43	4,89	2,05	(0,01)	0,74	2,17	9,99	23
	Rasio B	6,11	0,42	5,72	2,01	0,09	0,81	3,16	10,84	23
Solvabilitas Layanan	Rasio C	6,90	1,32	5,46	2,95	(2,35)	0,62	4,08	10,78	5
	Rasio D	7,71	1,31	6,13	2,93	(2,25)	0,71	5,07	11,64	5
	Rasio A	896.552,86	89.871,87	710.174,63	431.010,35	0,62	1,35	473.862,01	1.947.336,55	23
Solvabilitas Kemandirian	Rasio B	907.662,57	88.906,02	720.138,24	426.378,29	0,62	1,34	485.561,17	1.948.165,72	23
	Rasio C	704.196,96	79.139,09	538.342,15	379.537,73	0,34	1,20	290.790,05	1.576.928,86	23
	Rasio D	476.929,45	35.296,80	450.025,85	169.277,49	2,00	1,24	234.348,50	950.328,42	23
Solvabilitas Keuangan	Rasio E	55.279,70	8.419,96	40.682,04	40.380,71	1,72	1,44	14.188,59	170.582,27	23
	Rasio F	592.808,29	55.892,18	559.499,51	124.978,71	0,81	1,16	481.991,69	789.212,55	5
	Rasio A	0,63	0,02	0,65	0,10	(0,57)	(0,44)	0,46	0,77	23
Solvabilitas Keuangan	Rasio B	0,65	0,02	0,66	0,11	0,13	0,17	0,46	0,90	23
	Rasio C	0,64	0,04	0,68	0,09	4,67	(2,15)	0,47	0,69	5
	Rasio D	0,69	0,04	0,71	0,08	2,33	(1,15)	0,56	0,78	5
<b>Kabupaten</b>										
	Mean	Standard Error	Median	Standard Deviation	Kurtosis	Skewness	Minimum	Maximum	Count	
Solvabilitas Jangka Pendek	Rasio A	2.348.426.891,40	1.010.216.351,66	25,06	20.480.252.408,53	93,04	9,42	0,14	248.620.304.998,00	411
	Rasio B	2.472.847.708,63	1.061.188.281,33	28,44	21.513.613.216,34	92,95	9,40	0,53	263.277.986.999,36	411
	Rasio C	2.751.211.631,91	1.176.882.354,18	31,19	23.859.094.766,21	90,46	9,31	1,17	286.781.116.714,36	411
Solvabilitas Jangka Panjang	Rasio A	2.061.903.465.333,35	96.867.187.727,50	1.999.765.065.725,02	1.963.801.567.351,99	8,28	1,83	33,21	15.404.006.919.773,80	411
	Rasio B	26.708.959.647,07	10.903.319.136,91	367,13	221.044.460.077,05	67,43	8,27	18,39	2.054.899.427.130,58	411
	Rasio C	23.921.249.834,01	9.786.712.555,20	283,62	198.407.344.179,30	68,50	8,32	1,67	1.921.155.402.672,96	411
Solvabilitas Anggaran	Rasio A	1,19	0,01	1,17	0,10	21,25	3,22	1,03	2,17	411
	Rasio B	1,24	0,01	1,21	0,12	10,54	2,16	1,04	2,22	411
	Rasio C	1,78	0,01	1,72	0,30	4,91	1,81	1,36	3,37	411
Solvabilitas Operasional	Rasio D	1,04	0,00	1,03	0,05	78,47	6,30	0,93	1,75	411
	Rasio A	1,11	0,01	1,11	0,07	2,03	0,07	0,90	1,34	83
	Rasio B	1,20	0,01	1,20	0,11	(0,29)	0,30	0,94	1,46	83
Solvabilitas Keuangan	Rasio C	2,19	0,04	2,12	0,37	9,13	2,39	1,70	4,12	83
	Rasio D	1,16	0,01	1,15	0,07	3,14	(0,17)	0,90	1,40	83
	Rasio A	0,77	0,01	0,70	0,29	4,47	1,74	0,35	2,21	411
Solvabilitas Keuangan	Rasio B	1,75	0,01	1,69	0,29	4,26	1,71	1,32	3,14	411
	Rasio C	1,16	0,04	1,10	0,35	7,58	2,17	0,65	2,91	83
	Rasio D	2,14	0,04	2,05	0,35	6,86	2,02	1,51	3,84	83
Solvabilitas Kemandirian	Rasio A	2.721.755,06	48.679,81	2.570.277,86	986.892,30	5,43	1,60	816.527,52	8.262.061,99	411
	Rasio B	2.735.874,69	48.716,08	2.588.750,45	987.627,61	5,37	1,59	833.119,58	8.272.278,93	411
	Rasio C	2.358.191,95	45.417,38	2.189.175,31	920.752,60	7,59	1,96	716.849,25	7.782.765,16	411
Solvabilitas Keuangan	Rasio D	1.409.656,17	19.402,24	1.345.647,33	393.344,17	0,52	0,75	654.919,71	3.015.710,78	411
	Rasio E	241.380,65	5.220,53	223.605,31	105.836,41	1,18	0,97	52.697,71	609.593,76	411
	Rasio F	1.726.550,73	37.613,39	1.731.090,22	342.674,31	0,77	0,57	954.995,09	2.890.443,03	83
Solvabilitas Keuangan	Rasio A	0,12	0,00	0,11	0,07	5,98	2,21	0,03	0,48	411
	Rasio B	0,13	0,00	0,11	0,08	19,92	3,35	0,03	0,84	411
	Rasio C	0,15	0,01	0,13	0,07	4,78	2,19	0,06	0,40	83
Rasio D	0,17	0,01	0,15	0,09	6,22	2,42	0,07	0,52	83	
<b>Kota</b>										
	Mean	Standard Error	Median	Standard Deviation	Kurtosis	Skewness	Minimum	Maximum	Count	
Solvabilitas Jangka Pendek	Rasio A	798.695.331,07	798.694.862,58	21,04	9.584.338.350,99	144,00	12,00	1,36	115.012.060.680,37	144
	Rasio B	1.176.352.956,54	1.176.352.436,06	24,89	14.116.229.232,71	144,00	12,00	2,10	169.394.751.313,03	144
	Rasio C	1.205.001.302,22	1.205.000.754,65	26,21	14.460.009.055,76	144,00	12,00	2,73	173.520.109.216,72	144
Solvabilitas Jangka Panjang	Rasio A	3.112.566.690.223,70	531.636.507.618,74	1.452.315.695.757,26	6.379.638.091.424,87	13,91	3,73	55,98	34.690.400.238.417,60	144
	Rasio B	8.282.666.715,46	8.282.658.238,60	331,60	99.391.898.863,24	144,00	12,00	58,36	1.192.702.794.835,48	144
	Rasio C	7.077.665.354,71	7.077.657.484,37	258,10	84.931.889.812,39	144,00	12,00	6,82	1.019.182.685.618,76	144
Solvabilitas Anggaran	Rasio A	1,31	0,02	1,27	0,30	100,16	9,20	1,08	4,58	144
	Rasio B	1,32	0,03	1,27	0,30	99,14	9,13	1,08	4,59	144
	Rasio C	2,09	0,05	2,00	0,63	78,48	7,78	1,52	8,58	144
Solvabilitas Operasional	Rasio D	1,05	0,00	1,05	0,06	0,71	0,36	0,89	1,23	144
	Rasio A	1,27	0,11	1,15	0,60	27,56	5,19	1,02	4,34	29
	Rasio B	1,28	0,11	1,15	0,60	27,57	5,19	1,02	4,34	29
Solvabilitas Keuangan	Rasio C	2,85	0,42	2,35	2,27	26,54	5,06	1,73	14,43	29
	Rasio D	1,30	0,11	1,19	0,59	27,64	5,20	1,05	4,35	29
	Rasio A	1,06	0,05	0,97	0,61	79,53	7,85	0,51	7,34	144
Solvabilitas Keuangan	Rasio B	2,04	0,05	1,96	0,61	79,92	7,88	1,49	8,31	144
	Rasio C	1,78	0,42	1,31	2,26	26,88	5,10	0,71	13,32	29
	Rasio D	2,74	0,42	2,29	2,26	26,91	5,11	1,68	14,32	29
Solvabilitas Kemandirian	Rasio A	8.053.501,95	376.404,60	7.205.469,34	4.516.855,24	1,59	1,03	1.090.349,28	27.440.911,60	144
	Rasio B	8.089.029,68	377.219,62	7.215.602,22	4.526.635,42	1,54	1,02	1.090.485,67	27.449.747,85	144
	Rasio C	7.033.662,05	343.341,98	6.248.813,66	4.120.103,81	1,74	1,13	958.960,55	25.000.846,47	144
Solvabilitas Keuangan	Rasio D	2.572.160,41	100.306,98	2.392.244,70	1.203.683,78	(0,06)	0,68	724.872,07	6.095.937,13	144
	Rasio E	520.434,37	29.821,27	423.186,99	357.855,27	20,57	3,37	133.454,37	3.181.654,45	144
	Rasio F	2.902.811,71	238.866,85	2.943.762,15	1.286.337,37	(0,41)	0,55	961.607,67	5.576.662,30	29
Solvabilitas Keuangan	Rasio A	0,22	0,01	0,20	0,11	1,15	1,05	0,06	0,61	144
	Rasio B	0,23	0,01	0,21	0,11	0,76	0,95	0,06	0,62	144
	Rasio C	0,25	0,02	0,22	0,12	1,20	1,12	0,09	0,57	29
Rasio D	0,32	0,03	0,25	0,17	1,09	1,25	0,11	0,76	29	



**Tabel 2 Tren Nilai Median Solvabilitas Jangka Pendek**

Level Pemda	Indikator	Nilai Median Solvabilitas Jangka Pendek				
		2011	2012	2013	2014	2015
Pemerintah Provinsi	Rasio A	4,05	4,90	6,81	6,53	5,15
	Rasio B	5,90	4,97	8,62	8,07	6,35
	Rasio C	6,25	5,20	8,96	8,41	6,76
Pemerintah Kabupaten	Rasio A	25,53	28,60	25,22	33,56	19,34
	Rasio B	29,22	30,54	26,77	38,29	21,91
	Rasio C	32,08	33,38	28,59	40,78	23,49
Pemerintah Kota	Rasio A	17,34	23,92	29,29	24,37	14,02
	Rasio B	20,15	27,02	35,35	38,82	17,60
	Rasio C	21,45	29,61	37,09	40,04	18,76

**Tabel 3 Tren Nilai Median Solvabilitas Jangka Panjang**

Level Pemda	Indikator	Nilai Median Solvabilitas Jangka Panjang				
		2011	2012	2013	2014	2015
Pemerintah Provinsi	Rasio A	4.488.128.781.056,00	4.832.413.108.328,00	2.629.501.574.344,09	2.867.736.609.217,74	3.866.394.567.138,81
	Rasio B	72,28	84,40	74,15	57,42	46,22
	Rasio C	68,15	77,14	65,20	49,02	45,22
Pemerintah Kabupaten	Rasio A	1.297.306.917.496,02	1.815.542.693.789,15	2.089.506.867.379,00	2.490.108.320.557,74	2.194.785.634.328,55
	Rasio B	472,11	479,94	413,26	429,53	181,08
	Rasio C	438,76	183,00	386,05	383,55	180,08
Pemerintah Kota	Rasio A	1.270.799.574.154,08	1.383.622.482.618,11	2.033.955.035.405,29	1.636.493.567.690,10	1.335.184.398.822,48
	Rasio B	408,35	383,52	303,28	323,44	143,55
	Rasio C	383,43	166,07	281,75	300,19	142,55

**Tabel 4 Tren Nilai Median Solvabilitas Anggaran**

Level Pemda	Indikator	Nilai Median Solvabilitas Anggaran				
		2011	2012	2013	2014	2015
Pemerintah Propinsi	Rasio A	1,12	1,09	1,12	1,13	1,10
	Rasio B	1,71	1,56	1,54	1,71	1,73
	Rasio C	5,43	7,47	7,04	7,99	9,01
	Rasio D	0,98	1,02	1,04	1,05	0,97
Pemerintah Kabupaten	Rasio A	1,12	1,17	1,17	1,21	1,19
	Rasio B	1,14	1,18	1,19	1,24	1,34
	Rasio C	1,57	1,60	1,69	1,81	1,95
	Rasio D	1,03	1,02	1,04	1,05	1,02
Pemerintah Kota	Rasio A	1,20	1,30	1,22	1,34	1,27
	Rasio B	1,20	1,31	1,26	1,34	1,27
	Rasio C	1,82	1,87	1,79	2,03	2,16
	Rasio D	1,02	1,07	1,05	1,09	1,02

**Tabel 5 Tren Nilai Median Fleksibilitas Keuangan**

Level Pemda	Indikator	Nilai Median Fleksibilitas Keuangan				
		2011	2012	2013	2014	2015
Pemerintah Provinsi	Rasio A	3,43	5,56	4,96	5,55	5,33
	Rasio B	4,30	6,42	5,78	6,35	6,00
	Rasio C					5,46
	Rasio D					6,13
Pemerintah Kabupaten	Rasio A	0,57	0,59	0,67	0,79	0,91
	Rasio B	1,55	1,58	1,66	1,79	1,88
	Rasio C					1,10
	Rasio D					2,05
Pemerintah Kota	Rasio A	0,81	0,84	0,78	1,00	1,13
	Rasio B	1,80	1,83	1,77	1,98	2,10
	Rasio C					1,31
	Rasio D					2,29

**Tabel 6 Tren Nilai Median Solvabilitas Layanan**

Level Pemda	Indikator	Nilai Median Solvabilitas Layanan				
		2011	2012	2013	2014	2015
Pemerintah Provinsi	Rasio A	710.174,63	790.294,35	822.134,16	693.725,61	680.947,66
	Rasio B	720.138,24	798.475,65	837.474,87	709.327,82	700.886,31
	Rasio C	662.024,14	727.945,25	644.728,92	489.017,95	495.000,85
	Rasio D	308.819,18	397.883,32	421.032,23	485.000,12	527.645,11
	Rasio E	27.625,36	27.747,57	30.276,00	39.063,62	74.455,83
	Rasio F					559.499,51
Pemerintah Kabupaten	Rasio A	2.160.563,71	2.377.452,68	2.758.767,55	3.132.359,12	2.551.384,27
	Rasio B	2.163.844,00	2.428.762,57	2.767.893,96	3.138.241,62	2.561.416,45
	Rasio C	1.928.458,55	2.161.376,29	2.354.091,51	2.671.919,95	2.049.651,80
	Rasio D	1.056.272,64	1.215.452,57	1.354.355,12	1.559.595,27	1.819.139,33
	Rasio E	133.907,09	205.891,79	222.449,99	266.958,96	344.700,57
	Rasio F					1.731.090,22
Pemerintah Kabupaten	Rasio A	6.332.981,56	6.740.834,23	3.098.282,93	8.174.067,32	7.315.262,03
	Rasio B	6.344.226,30	6.750.064,11	3.115.691,09	8.195.398,63	7.438.434,93
	Rasio C	5.732.360,92	6.031.510,48	2.635.743,67	6.955.537,04	5.612.109,08
	Rasio D	2.001.804,22	2.235.174,93	1.396.708,45	3.017.013,97	3.194.928,94
	Rasio E	300.266,57	329.976,04	256.771,15	495.555,43	582.918,57
	Rasio F					2.943.762,15

**Tabel 7 Tren Nilai Median Kemandirian Daerah**

Level Pemda	Indikator	Nilai Median Kemandirian Daerah				
		2011	2012	2013	2014	2015
Pemerintah Provinsi	Rasio A	0,769	0,591	0,629	0,664	0,668
	Rasio B	0,742	0,590	0,659	0,690	0,657
	Rasio C					0,682
	Rasio D					0,706
Pemerintah Kabupaten	Rasio A	0,079	0,088	0,099	0,137	0,135
	Rasio B	0,081	0,091	0,103	0,142	0,138
	Rasio C					0,129
	Rasio D					0,150
Pemerintah Kota	Rasio A	0,165	0,169	0,148	0,220	0,232
	Rasio B	0,171	0,184	0,153	0,232	0,248
	Rasio C					0,225
	Rasio D					0,254